

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2015 mengacu pada Visi dan Misi Walikota Cirebon 2013-2018. Visi Walikota tersebut adalah **“TERWUJUDNYA KOTA CIREBON YANG RELIGIUS, AMAN, MAJU ASPIRATIF DAN HIJAU TAHUN 2018”**

Untuk mencapai Visi jangka menengah 2013–2018 Kota Cirebon, Misi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan aparatur pemerintahan dan masyarakat Kota Cirebon yang religius, dengan tujuan yang akan dicapai, yaitu :
 - a. Meningkatkan nilai keimanan dan ketaqwaan pada aparatur pemerintahan.
 - b. Meningkatkan nilai keimanan dan ketaqwaan pada masyarakat.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah:

- a. Meningkatkan nilai keimanan dan ketaqwaan pada aparatur pemerintahan
- b. Meningkatnya kualitas sarana prasarana keagamaan
- c. Terwujudnya prestasi Kota Cirebon dalam bidang keagamaan
- d. Terpeliharanya suasana kerukunan hidup antar umat beragama yang harmonis dan saling menghargai terhadap ajaran agamanya masing-masing.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, maka program yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Program Peningkatan Kualitas Religius Aparatur
 2. Program Peningkatan Kualitas Sarana Peribadatan
 3. Program Peningkatan kompetensi Keagamaan
 4. Program Kerukunan Umat Beragama.
-
2. Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur serta merevitalisasi kelembagaan yang efektif dan efisien menuju tata pemerintahan yang baik, amanah, bersih, dan bebas dari KKN, dengan tujuan yang akan dicapai, yaitu :



- a. Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur daerah, pencapaian target pembangunan, serta transparansi dan akuntabilitas APBD.
- b. Meningkatkan penataan struktur dan mekanisme kerja organisasi perangkat daerah agar berfungsi optimal.
- c. Membangun suasana pemerintahan yang harmonis, mangayomi dan komunikatif.
- d. Mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

- a. Terwujudnya aparatur daerah yang memiliki integritas dan profesional
- b. Terwujudnya tertib administrasi keuangan SKPD.
- c. Terwujudnya tertib administrasi kearsipan daerah.
- d. Terwujudnya pelayanan prima dalam perijinan.
- e. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan.
- f. Terwujudnya kesesuaian struktur dan tatalaksana SKPD.
- g. Tercapainya kesepakatan penetapan batas wilayah dengan Kabupaten Cirebon.
- h. Penataan sistem manajemen dan proses kinerja dilingkungan pemerintah kota dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Misi ke-2 tersebut, maka program-program yang akan dilaksanakan adalah:

1. Program Pendidikan Kedinasan.
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
4. Program Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah
5. Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
6. Program Peningkatan Kualitas Penganggaran dan Realisasi APBD
7. Program Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi APBD
8. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH



9. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
 10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 11. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
 12. Program Pengembangan Data/Informasi Perencanaan
 13. Program Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 14. Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 15. Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan
 16. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
 17. Program penataan dan pelayanan perijinan
 18. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 19. Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi investasi
 20. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
 21. Program pelayanan pencatatan sipil
 22. Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 23. Program perencanaan kebijakan kependudukan
 24. Program Penataan Kelembagaan
 25. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
 26. Program Pembinaan Pemerintahan
 27. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi
3. Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban umum, tujuannya adalah :
- a. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan cinta bangsa dan tanah air Indonesia.
 - b. Meningkatkan kedisiplinan dan kesadaran hukum masyarakat.
 - c. Menegakkan peraturan dan perundang-undangan.
 - d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam aspek kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan
 - e. Meningkatkan tertib lalu lintas dan perpikiran.
 - f. Meningkatkan penataan sektor informal untuk mendukung ketertiban dan keindahan kota.



- g. Meningkatkan daya tanggap pemerintah dan masyarakat terhadap situasi bencana.

Dengan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah:

- a. Terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam Bhineka Tunggal Ika
- b. Terwujudnya masyarakat yang sadar hukum
- c. Menurunnya tingkat pelanggaran perda
- d. Terwujudnya RW K-3
- e. Menurunnya titik rawan kemacetan dan kecelakaan
- f. Tertatanya sektor informal
- g. Meningkatnya daya tanggap terhadap bencana.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, maka program-program yang akan dilaksanakan adalah:

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
3. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
5. Program Pembinaan Pemuda di Daerah Rawan Ketertiban Umum
6. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
7. Program Penegakan Peraturan Daerah
8. Program RW Bersih
9. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
10. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
11. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Pelayaran
13. Program Peningkatan Pelayanan Parkir
14. Program Pembinaan Pedagang Kakilima
15. Program Peningkatan Kapasitas Petugas Pemadam Kebakaran



16. Program Penanggulangan Korban Bencana
 17. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
4. Meningkatkan kualitas sumber daya Kota Cirebon dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial untuk kesejahteraan masyarakat, dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yaitu :
- a. Mengoptimalkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan bagi masyarakat, dengan sasaran terbukanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan.
 - b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. dengan sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya indeks kesehatan masyarakat dan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.
 - c. Meningkatkan olah raga prestasi dan mewujudkan Kota Cirebon sebagai Kota Pusaka, sedangkan sasarannya adalah berprestasi di tingkat propinsi serta meningkatnya jumlah pusaka budaya yang dilestarikan.
 - d. Meningkatkan daya beli masyarakat dan sasarannya adalah meningkatnya indeks daya beli masyarakat
 - e. Menurunkan jumlah keluarga miskin dan sasaran menurunnya jumlah KK miskin
 - f. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan kualitas penanganan masalah kesejahteraan sosial dan meningkatkan pengarusutamaan gender.
- Sasaran yang akan dicapai yaitu menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, serta terpenuhinya kesetaraan gender.
- Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, maka program-program yang akan dilaksanakan adalah:
1. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 3. Program Pendidikan Menengah
 4. Program Pendidikan Non Formal
 5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 6. Program Pendidikan Anak Usia Dini



7. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
8. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
9. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
11. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
12. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
13. Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan
14. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
15. Program Keluarga Berencana
16. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
17. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
18. Program pengelolaan keragaman budaya
19. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
20. Program pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
21. Program pengembangan kewirausahawan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
22. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
23. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
24. Program Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
25. Program Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
26. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
27. Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
28. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, peternakan, dan perikanan;
29. Program Rehabilitasi hutan dan lahan
30. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
31. Program Peningkatan Produksi Peternakan
32. Program Peningkatan produksi perikanan tangkap
33. Program peningkatan produksi perikanan budidaya



34. Program pengembangan destinasi pariwisata
 35. Program satu data keluarga miskin
 36. Program pengendalian dan pengawasan penanggulangan kemiskinan
 37. Program peningkatan akses pendidikan bagi keluarga miskin
 38. Program peningkatan akses pelayanan kesehatan, rujukan bagi keluarga miskin
 39. Program peningkatan akses pelayanan air bersih, sanitasi, dan listrik bagi keluarga miskin
 40. Program penataan kawasan perumahan keluarga miskin
 41. Program pelayanan akses pangan dan gizi bagi keluarga miskin
 42. Program pembentukan lembaga ekonomi mikro berbasis mesjid untuk keluarga miskin
 43. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 44. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 45. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo
 46. Program Penguatan Jejaring kemitraan dalam rangka penanganan PMKS
 47. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 48. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya proporsi pembiayaan pembangunan yang berasal dari Musrenbang Kecamatan serta meningkatnya nilai swadaya masyarakat dalam stimulan/bantuan RW Sedangkan program-program yang akan dilaksanakan adalah:
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
 2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan.
6. Meningkatkan kualitas keseimbangan dan pelestarian lingkungan hidup yang tujuannya adalah:



- a. Mewujudkan lingkungan kota yang bersih, sehat, hijau, nyaman dan berkelanjutan bagi warga kota
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan
- c. Meningkatkan keserasian pembangunan terhadap Tata Ruang Kota
- d. Meningkatkan sarana prasarana penunjang perumahan rakyat dan perhubungan

Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

- a. Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik dan privat serta areal permukiman
- b. Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup
- c. Meningkatnya pengelolaan sampah dan sumber sampah secara terpadu dan berwawasan lingkungan serta peningkatan kapasitas TPA
- d. Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung akselerasi pergerakan masyarakat
- e. Tersedianya sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir, dan dampak perubahan iklim
- f. Tersedianya sistem pengelolaan jaringan air limbah domestik secara optimal
- g. Tersedianya Sistem Pengelolaan Air Minum
- h. Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten
- i. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan
- j. Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni
- k. Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, maka program-program yang akan dilaksanakan adalah:

1. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
2. Program Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum
3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup



4. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
5. Program perlindungan dan konservasi SDA
6. Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat
7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
8. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
9. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
10. Program Pembangunan Saluran Drainase Primer dan Sekunder
11. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Primer dan Sekunder
12. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
13. Program Pengendalian Banjir
14. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah
15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
16. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
17. Program Penyediaan Sistem Informasi Pengendalian Tata Ruang
18. Program Lingkungan Sehat Perumahan
19. Program Pengembangan Perumahan
20. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
21. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015

Berdasarkan hasil Musyawarah Pembangunan tanggal 13 Maret 2014 bertempat di Hotel Zamrud menghasilkan kesepakatan kegiatan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2015 sebagai berikut:

1. Bidang Pemerintahan
 1. Forum SKPD untuk Tahun 2016 Bidang Pemerintahan perlu menambah keikutsertaan perwakilan SKPD sesuai dengan indikator bidang dan isu permasalahan yang ada, serta perlunya kecamatan untuk dilibatkan di kelompok bidang lainnya;
 2. Program kegiatan yang disusun untuk Tahun Anggaran 2016 harus mengacu kepada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2013-2018 dimana setiap SKPD akan



- menyusun RKPD yang meliputi semua program sesuai urusan dan tupoksi dengan memperhatikan/berpedoman pada Renstra serta RPJMD, serta Bappeda siap melakukan pembinaan dan fasilitasi penyusunan RKPD agar sejalan dengan Renstra serta RPJMD;
3. Perkembangan isu pembangunan wilayah selatan perlu didukung oleh seluruh SKPD dan didukung juga oleh pagu anggaran yang mengarah kepada pembangunan wilayah selatan;
 4. Bappeda perlu merumuskan program kegiatan pengganti sebagai akibat tidak adanya dana aspirasi yang selama ini diemban oleh wakil rakyat sesuai Daerah Pemilihan, untuk selanjutnya kepada 5 (lima) camat agar melakukan dialog dengan Bappeda dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk bersama-sama merumuskan program dan kegiatan dimaksud;
 5. Diperlukan kebersamaan untuk membangun kinerja bersama dan semangat kerja sebagai jawaban atas solusi masalah lingkup pemerintahan, diantaranya dalam tingkat capaian pencairan anggaran yang dinilai rendah tingkat konsistensinya dengan prioritas yang disusun;
 6. Pembinaan laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan asset daerah perlu menjadi perhatian seluruh SKPD agar mempersiapkan capaian WTP di Tahun 2016 bisa tercapai;
 7. Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagai fasilitator pelaksanaan tugas, akan selalu mendorong terciptanya suasana kondusifitas antara legislatif dan eksekutif;
 8. Pagu anggaran untuk Musrenbang Kecamatan dari 17 Milyar di Tahun 2014 menjadi 20 Milyar pada Tahun 2015 dan 20 Milyar pada Tahun 2016;
 9. SDM kecamatan dan kelurahan perlu adanya penguatan kapasitas secara menyeluruh seiring dengan perkembangan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Hasil aspirasi Musrenbang Kecamatan sebagian besar meminta agar pelaksanaan kegiatan fisik dilaksanakan secara swakelola di kelurahan khususnya untuk yang anggarannya dibawah Rp. 50



juta. Sesuai dengan Peraturan Walikota tentang Kewenangan Kecamatan dan Kelurahan hal tersebut dimungkinkan dilaksanakan tetapi khusus untuk pemeliharaan prasarana kota. Dan untuk melaksanakan kegiatan swakelola perlu dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan pengadaan barang jasa secara swakelola kepada unsur kelurahan dan LKK yang dibina oleh Setda c.q Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa;

11. Fenomena alam berupa tanah timbul di pesisir pantai Kota Cirebon perlu segera diambil langkah-langkah konkret dalam penetapan status hukum berupa kepemilikan/pengelolaan atas tanah tersebut dan agar Setda, Bappeda, DPUPESDM, Camat membuat kajian dan konsultasi ke Pemerintah Pusat;
12. Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kota Cirebon yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2014 telah mendapat nilai 94,5 kriteria Tercapai. Kelanjutan kegiatan tersebut pada Tahun 2015 akan dimonev oleh Inspektorat.

2. Bidang Fisik dan Lingkungan

1. Perlu adanya penanganan tentang kerusakan lingkungan berupa Erosi, Abrasi, akresi pantai, dan Penurunan muka tanah (deplesi);
2. Perlu adanya peningkatan Ketahanan Lingkungan dan kondisi kehidupan masyarakat miskin perkotaan di kawasan pesisir akibat adanya dampak Perubahan Iklim;
3. Optimalisasi Sistem Mitigasi (early warning);
4. Pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau beserta penataannya (taman kota);
5. Melaksanakan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan yang komprehensif;
6. Perlu adanya pengkajian kebijakan Green Building;
7. Perlu penanganan kebutuhan prasarana penunjang permukiman sehat seperti jalan lingkungan, saluran pembuangan air limbah dan air hujan, ketersediaan air bersih, dan ketersediaan ruang publik;



8. Perlu adanya pengembangan rumah susun sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah akibat keterbatasan lahan dan tingginya nilai lahan;
 9. Adanya Tempat Pemakaman Umum;
 10. Penanganan Kemacetan lalu lintas yang diakibatkan adanya dua double track kereta api yang melintasi Kota Cirebon;
 11. Pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana perhubungan khususnya di wilayah selatan dan perbatasan kota;
 12. Penambahan fasilitas sarana dan prasarana perpajakan;
 13. Perlu adanya penuntasan penetapan batas wilayah dengan kabupaten;
 14. Melakukan optimalisasi pengawasan, penertiban dan penegakan hukum terhadap penambangan galian C liar;
 15. Penyelesaian beberapa dokumen turunan dari RTRW (RDTRK, evaluasi Perda Bangunan Gedung, RTBL, dsb);
 16. Penyelesaian pembangunan fisik prioritas : jalan CORR;
 17. Sistem pengolahan sampah dan masa teknis TPA kopi luhur yang akan segera berakhir.
 18. Pemanfaatan galian c untuk embung.
 19. Peningkatan kualitas hasil pekerjaan terutama untuk Bidang Infrastruktur.
 20. Peningkatan jalan tembus RW.06 Kedungmenjangan sebelah MTs II ke Desa Ciperna .
 21. Pembangunan infrastruktur harus memperhatikan aspek lingkungan (jika pembangunan jalan aspal harus menyediakan biopori/ pembangunan jalan dengan menggunakan paving blok). Aspek resapan air menjadi perhatian utama.
 22. Perlu penguatan perilaku hidup bersih dan sehat melalui model pengelolaan sampah berbasis RW ZERO WASTE (target 2016 per-kecamatan 1 model percontohan RW ZERO WASTE).
3. Bidang Sosial Budaya
1. Kesesuaian Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon 2013-2018;



2. Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana;
2. Meningkatkan status gizi masyarakat secara komprehensif dan terpadu intas sektoral;
3. Mengendalikan penyakit tidak menular;
4. Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif;
5. Meningkatkan upaya penanggulangan HIV/AIDS;
6. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan rumah sakit khususnya untuk keluarga miskin melalui optimalisasi sistem rujukan berjenjang dan pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit;
7. RSUD Gunung Jati sebagai Rumah Sakit Rujukan BPJS Jawa Barat Bagian Timur (Ciayumajakuning) dan Rumah Sakit Rujukan pasien MDR TB;
8. Menuntaskan Masyarakat Kota Cirebon Bebas Buta Huruf Latin;
9. Meningkatkan akses layanan pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah melalui Program Wajib Belajar 12 Tahun;
10. Meningkatkan mutu sistem PPDB untuk mendukung Peningkatan mutu pendidikan;
11. Meningkatkan ruang kelas layak pakai pada setiap jenjang pendidikan;
12. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui sertifikasi dan mutu tenaga kependidikan;
13. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan biaya sekolah pada tingkat pendidikan dasar dan menengah secara bertahap serta beasiswa perguruan tinggi bagi masyarakat Kota Cirebon;
14. Pengembangan pendidikan karakter disetiap satuan pendidikan
15. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat menuju RW RAMAH melalui RW Bersih dan Sehat, RW Pintar, RW Zero Waste dan RW K3 ;
16. Meningkatkan Mutu dan Daya Saing Tenaga Kerja Kota Cirebon dalam menyongsong MEA melalui Akreditasi Balai Latihan Kerja dan Kerjasama Lembaga Sertifikasi Pelatihan;
17. Menguatkan Jejaring Kemitraan dalam rangka Penanganan PMKS;



18. Meningkatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi PMKS;
19. Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penguatan fungsi keluarga dan optimalisasi Pusat Pelayanan Terpadu (RSUD Gunung Jati);
20. Mengoptimalkan peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) melalui perluasan jejaring pelayanan;
21. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui pengarusutamaan gender dan anak;
22. Menjadikan Perpustakaan sebagai salah satu icon kota Cirebon;
23. Memiliki Diorama sejarah Kota Cirebon;
24. Optimalisasi pelayanan pencatatan sipil dan kependudukan;
25. Meningkatkan sinergitas dalam menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
26. Pelembagaan 4 (empat) pilar wawasan kebangsaan dikalangan masyarakat, pelajar dan mahasiswa;
27. Pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah (kesenian , bahasa, adat istiadat dan cagar budaya) melalui berbagai festival;
28. Pendidikan kedinasan, peningkatan kapasitas SDM aparatur serta pembinaan dan pengembangan aparatur.

4. Bidang Ekonomi

1. Usulan pembangunan museum.
2. Pembebasan lahan pertanian yang masih produktif untuk dibebaskan menjadi lahan pertanian Abadi.
3. Kesiapan Pemerintah Kota antisipasi perubahan kewenangan pengelolaan wilayah laut. yang semula 0-4 mil menjadi tidak ada (Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014).
4. Ketegasan dari Pemkot apakah kehutanan dikelola oleh Kantor Lingkungan Hidup atau oleh Dinas Kelautan Perikanan, Peternakan dan Pertanian.
5. Review RPJMD di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah.
6. Penataan dan Pemberdayaan PKL menjadi prioritas yang harus segera dilaksanakan.



7. Pembangunan Gedung kantor antara lain Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu.
8. Kewenangan urusan kemetrolagian Legal harus sudah dipersiapkan di Kota Cirebon.
9. Optimalisasi pengelolaan keuangan, pendapatan, dan asset daerah.
10. Upaya pelayanan perijinan yang komprehensif dengan berbasis online lintas SKPD.
11. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah (PAD).
12. Kajian Pelaksanaan investasi Daerah Tahun 2016.
13. Persiapan dan implementasi penerapan kebijakan insentif dan disinsentif investasi.
14. Komitmen bersama terkait dengan kebijakan ketahanan pangan daerah.
15. Penanggulangan kemiskinan secara terpadu bidang ekonomi dan bidang lainnya.
16. Kesiapan Pemerintah Kota Cirebon dalam mendukung program pembinaan pemuda dan olah raga terkait tingginya kenakalan remaja.
17. Koordinasi lintas SKPD terkait keamanan pangan.
18. Intervensi terhadap stabilitas harga pangan.